

**NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME:
*Sebuah Implikasi & Tantangan Negara-Bangsa Indonesia ke Depan.***

*MULTICULTURALISM VALUES:
An Implication & Challenges of the Indonesian Nation in the Future.*

Dr. Slamet, S.Pd., M.Pd., M.Si.

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas IVET, Jl. Pawiyatan Luhur IV/17 Semarang 50233 Telp. 024-8316105; 8316118
Fax 0248316105 E-Mai: info@ivet.ac.id Website: <http://www.ivet.ac.id>
E-mail: slametikipvetsmg@yahoo.com

ABSTRAK

Negara-bangsa Indonesia penuh dengan keberagaman, baik suku bangsa, agama, budaya, etnis/ras, kewilayahan, dan sebagainya, maka pemahaman dan penerapan nilai-nilai multikultural menjadi sebuah keharusan. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) dimasukkan ke dalam kurikulum adalah sangat urgen, setidaknya "dititipkan" pada mata pelajaran lain yang relevan, seperti: PKn, Sejarah, dan Agama. Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keberagaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap warga negara. Dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang non-Eropa. Masih memerlukan kajian mendalam tentang konsep dan praksis pelaksanaannya, bahkan hingga saat ini konsep pendidikan multikultural belum dikaji secara serius oleh pemerintah. Setidaknya bila ditilik secara yuridis, Undang-Undang No. 20/2003 tentang SISDIKNAS telah memberi peluang untuk menjabarkan lebih lanjut terhadap konsep pendidikan multikultural, utamanya pada Pasal 4 ayat (1) yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kultur masyarakat yang sangat beragam.

Kata Kunci: Nilai-nilai multikulturalisme, implikasi, tantangan.

ABSTRACT

Nation-state of Indonesia is full of diversity, its ethnic, religious, cultural, racial, territorial, and so on, so understanding and applying multicultural values is a very important thing. Multicultural education (multicultural education) included in the curriculum is very urgent, at least "entrusted" on other relevant subjects, such as: Civics, History, and Religion. Multicultural education is a response to the development of the diversity of the school population, as demands equal rights for every citizen. Another dimension, multicultural education is the development of curriculum and educational activities to enter various views, history, achievements, and concerns of non-Europeans. Still requires in-depth study of the concepts and praxis of their implementation, even today the concept of multicultural education has not been seriously studied by the government. At least if judicially judging, UU No. 20/2003 on SISDIKNAS has provided an opportunity to further elaborate on the concept of multicultural education, especially in Article 4 paragraph (1) which regulates the implementation of education by considering the very diverse cultural values of the community.

Keywords: Values of multiculturalism, implications, challenges

PENDAHULUAN

Mata pelajaran sejarah diberikan untuk membangun karakter generasi muda penerus bangsa yang demokratis dan bertanggungjawab. Ada 3 (tiga) karakter yang diperoleh dari pembelajaran sejarah. Pertama, secara ontologi terkait proses penyadaran, pemberdayaan, dan pembudayaan nilai kepada peserta didik untuk menjadi individu sekaligus sebagai warga negara; kedua, secara epistemologi harus mengedepankan pendekatan multikultur dan *multiapproac*, ini terkait realitas kebhinekaan masyarakat dan keanekaragaman potensi peserta didik; dan ketiga, secara aksiologi dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik sebagai individu dan sebagai warga masyarakat dalam sebuah negara-bangsa (Hugiono & Poerwanta, 1992).

Satu sisi, pembelajaran sejarah tidak dapat terlepas dari keberadaan guru sejarah itu sendiri, sebab dalam rangkaian pembelajaran guru memiliki peran besar maka pemerintah dari tahun ke tahun berupaya untuk meningkatkan kualitas guru. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun pengemasannya belum memberikan hasil yang cukup signifikan. Hal ini tercermin banyaknya sorotan terhadap guru, termasuk guru sejarah. Keluhan juga muncul bahwa pembelajaran sejarah terkesan membosankan, sehingga wajar bila mata pelajaran ini diremehkan dan dianggap sebagai suatu pelajaran yang materinya sangat mudah, karena bisa dibaca semalam untuk menghadapi ujian esok harinya. Sisi lain, proses pembelajaran sebagai pemahaman dan kesadaran mampu menjadi sumber inspirasi dan pangsang bagi tumbuhkembangnya rasa kebangsaan dan tanggung jawab serta kewajiban bagi peserta didik. Dalam hal ini semangat nasionalisme dapat ditanamkan di kalangan generasi muda yang dimulai dari peserta didik. Ini mengacu pada pemahaman bahwa tanpa idealisme dan aspirasi tentang tanah air dan bangsa, maka penghayatan terhadap negara dan bangsa akan terasa dangkal yang akhirnya hanya tertanam hal yang bersifat materialistis dan konsumeristis belaka (Gazalba, 1981), kondisi ini seperti halnya negara-bangsa Indonesia yang serba kebhinekaan dan pluralistik.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian digunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pendekatan digunakan fenomenologi yang berusaha mengungkapkan kejadian sesuai kondisi sebenarnya dan sangat tergantung pada: 1) persepsi; 2) pemahaman; 3) pengertian; dan 4) anggapan-anggapan seseorang (Bungin, 2008). Pelaksanaan penelitian mengambil lokasi di Kota Semarang dengan objek beberapa SMA negeri dan swasta. Informan kunci adalah pemangku kebijakan pada dinas pendidikan Kota Semarang, sedangkan informan tambahan adalah para guru sejarah SMA di lingkungan Kota Semarang.

Teknik pengumpulan data digunakan: dokumen, observasi, dan wawancara, sedangkan teknik analisis data digunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman meliputi 4 (empat) komponen: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) sajian data; dan 4) penarikan simpulan/verifikasi. Adapun untuk menguji keabsahan data digunakan uji kredibilitas baik melalui triangulasi data maupun pengecekan dengan anggota/*membercheck* (Moleong, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci dan informan tambahan diperoleh hasil: 1) perlu adanya sebuah konsep pendidikan multikultur baku yang ditetapkan oleh pemerintah (kementerian pendidikan); 2) perlu adanya desain guna melakukan pendekatan dalam pendidikan multikultural pada suatu tataran masyarakat yang penuh permasalahan antar suku bangsa, ras, agama, budaya, kewilayahan dan sebagainya; dan 3) perlu keberanian mengambil sikap segera menerapkan pendidikan multikultural karena dipandang urgen.

Pembahasan

Konsep Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme adalah paham tentang kultur (budaya) yang beragam, dalam keberagaman kultur itu keniscayaan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, dan sebagainya, agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik yang berkepanjangan (Naim dan Sauqi, 2011). Sebagai sebuah wacana baru, pendidikan multikultural masih diperdebatkan oleh pakar pendidikan, namun bukan berarti pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Meminjam pendapat Andersen dan Cusher (dalam Parekh, 2012); pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Banks (1993) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan). Sejalan dengan pemikiran itu, Slamet (2016) mengemukakan bahwa secara sederhana pendidikan multicultural sebagai sebuah pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur

lingkungan masyarakat yang serba plural seperti Indonesia. Dengan demikian guru sejarah sebagai ujung tombak terdepan dalam proses pembelajaran perlu memahami tentang nilai-nilai multikultur yang ada di negara ini, untuk kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran yang diharapkan dapat mempersatukan berbagai latar belakang peserta didik dari keberagaman, pluralistik, dan multikultural. Lebih lanjut dikemukakan oleh Hernandez (dalam Mahfud, 2011) bahwa pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Atau dengan kata lain, ruang lingkup pendidikan sebagai ruang transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (*plural*), baik latar belakang maupun basis sosial budaya yang melingkupinya.

Berdasarkan paparan di atas, dalam konteks teoretis, pendidikan multikultural setidaknya terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu: 1) pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme; 2) pendidikan tentang perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan; 3) pendidikan bagi pluralisme kebudayaan; 4) pendidikan dwi-budaya; dan 5) pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia yang harus dikuasai oleh guru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik.

Pendekatan Pendidikan Multikultural

Mendesain pendidikan multikultural dalam tataran masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok, agama, budaya, suku bangsa, etnis dan sebagainya, seperti Indonesia, mengandung tantangan yang tidak ringan, sehingga perlu disadari bahwa pendidikan multikultural tidak hanya sebatas "merayakan keragaman". Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasial. Dalam kondisi demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan pada advokasi untuk menciptakan peserta didik yang toleran. Seperti dikemukakan Mahfud (2011) bahwa untuk mencapai sasaran itu diperlukan sejumlah pendekatan, yaitu: 1) tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan di kalangan peserta didik semata-mata berada di tangan mereka, tetapi semakin banyak pihak yang bertanggung jawab, karena program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah; 2) menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik lebih mengasosiasikan kebudayaan dengan kelompok sosial yang relatif *self sufficient*, dari pada dengan sejumlah orang yang secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan; 3) karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dari orang yang telah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah yang terpisah-pisah secara etnik merupakan antithesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok akan menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis; 4) pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi, ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional; dan 5) kemungkinan bahwa pendidikan (formal dan non formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini akan menjauhkan dari konsep dwi-budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi.

Dalam konteks ke-Indonesia-an dan kebhinekaan, kelima pendekatan itu harus diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu yang terejawantahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan bekerjasama dalam masa yang relatif sama, sehingga individu dapat memenuhi kebutuhannya dan menyerap watak sosial (Slamet, 2017). Kondisi tersebut selanjutnya membuat sebagian menjadi

komunitas terorganisir yang berpikir tentang dirinya dan membedakan eksistensinya dari ekstensi komunitas. Sisi lain bila kehidupan dalam masyarakat berarti interaksi antara individu dan lingkungan sosial, maka yang membentuk individu adalah pendidikan atau dengan istilah lain masyarakat pendidik.

Urgensi Pendidikan Berbasis Multikultural

Sejak kemunculannya sebagai disiplin ilmu pada dekade 1960-an dan 1970-an, pendidikan berbasis multikulturalisme atau *Multicultural Based Education* (MBE) telah didefinisikan dalam banyak cara dari berbagai perspektif. Dalam terminologi ilmu pendidikan dikenal peristilahan yang hampir sama dengan MBE, yaitu pendidikan multikultural (*multicultural education*) seperti yang digunakan dalam konteks kehidupan multikultural negara-negara Barat. Sejumlah definisi terikat dalam disiplin ilmu tertentu, seperti: pendidikan antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya.

Hernandez dalam Sunarto (2004) mengemukakan definisi klasik untuk menekankan dimensi konseptual MBE yang penting bagi pendidik. Definisi pertama menekankan esensi MBE sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami individu dalam pertemuan manusia kompleks dan beragam (*plural*) secara kultur. Definisi itu bermaksud merefleksikan pentingnya budaya, ras, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, kewilayahan, dan pengecualian dalam proses pendidikan. Dalam konseptualisasinya, MBE adalah sebuah kegiatan pendidikan yang bersifat *empowering*. Oleh karenanya MBE adalah sebuah visi tentang pendidikan yang selayaknya dan seharusnya dapat diterapkan dan dipahami semua peserta didik.

Berkaitan dengan peserta didik, MBE menyoalkan tentang etnisitas, gender, kelas, bahasa, agama, dan pengecualian-perkecualian yang mempengaruhi, membentuk, dan mempola tiap-tiap individu sebagai makhluk budaya. MBE adalah hasil perkembangan seutuhnya dari konstelasi atau interaksi unik masing-masing individu yang memiliki kecerdasan, kemampuan, dan bakat. MBE mempersiapkan anak didik bagi kewarganegaraan (*citizenship*) dalam komunitas budaya dan bahasa yang majemuk dan saling terkait. MBE juga berkenaan dengan perubahan pendidikan yang signifikan.

MBE menggambarkan realitas budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks, yang secara luas dan sistematis mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di dalam sekolah dan luar ruangan. MBE juga menyangkut seluruh aset pendidikan yang termanifestasikan melalui konteks, proses, dan muatan (*content*). MBE menegaskan dan memperluas kembali praktik yang patut dicontoh, dan berupaya memperbaiki berbagai kesempatan pendidikan optimal yang tertolak. Ia memperbincangkan seputar penciptaan lembaga pendidikan yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, yang mencerminkan cita-cita persamaan, kesetaraan, dan keunggulan.

Paparan di atas menggambarkan epistemologi pendidikan multikultural dan konsep pendidikan multicultural. Konteks pendidikan multikulturalisme di Indonesia, maka pendidikan multikultural perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultur, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna perwujudan tersebut.

Supardan (2005) mengemukakan bahwa dalam mewujudkan pendidikan multikulturalisme di Indonesia perlu diperhatikan: 1) pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; 2) dengan pelajaran pendidikan berbasis multikultural, peserta didik diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya; dan 3) pendidikan multikultural diterapkan dalam kurikulum nasional dan sangat relevan di alam demokrasi seperti negara-bangsa Indonesia.

1) Sarana alternatif pemecahan konflik

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan diharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di masyarakat yang secara realitas plural. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Spektrum kultur bangsa Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan itu menjadi suatu asset dan bukan sumber perpecahan. Saat ini, pendidikan multikultural mempunyai 2 (dua) tanggung jawab

besar, yaitu: 1) menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi; dan 2) "menyatukan" bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Disadari atau tidak, pendidikan kebangsaan dan ideologi telah banyak diberikan di perguruan tinggi, namun pendidikan multikultural belum diberikan dengan proporsi yang tepat. Oleh sebab itu, sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai azas otonomi pendidikan atau sekolah. Sebaiknya, pendidikan multikultural lebih ditekankan pada mata pelajaran moral dan kebangsaan, termasuk mata pelajaran sejarah, PKn, dan agama.

Pada dasarnya, model pembelajaran sebelumnya yang terkait dengan kebangsaan memang sudah ada. Namun, masih kurang memadai sebagai sarana pendidikan guna menghargai perbedaan suku bangsa, budaya, agama, etnis, dan kewilayahan. Hal itu terlihat dengan munculnya konflik yang kerap terjadi pada realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman toleransi masih sangat kurang, bahkan hingga saat ini jumlah peserta didik dan mahasiswa yang memahami segala sesuatu yang sebenarnya ada di balik budaya suatu bangsa masih sangat minim dan dangkal.

Supriyoko (2011) mengemukakan bahwa masyarakat justru mengetahui lebih dalam mengenai stereotip suatu suku bangsa dibandingkan mengenal sesuatu yang sebenarnya dimiliki suku tersebut. Padahal, dalam konteks diskursus pendidikan multikultural, memahami makna dibalik realitas budaya suatu suku bangsa merupakan hal yang esensial, maka penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila terbentuk pada diri peserta didik dan mahasiswa memiliki sikap hidup saling toleran, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku bangsa, agama, bahasa, adat-istiadat, kewilayahan atau sebab lain.

2) Peserta didik tidak tercerabut dari akar budaya

Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina peserta didik agar tidak tercerabut dari akar budaya yang dimiliki sebelumnya, tatkala ia berhadapan dengan realitas sosial-budaya di eranya. Era globalisasi saat ini, pertemuan antar budaya menjadi "ancaman" serius bagi anak didik. Mensikapi realitas global tersebut, peserta didik hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga memiliki kompetensi luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Mengingat beragamnya realitas kebudayaan di negeri ini dan luar negeri, peserta didik sudah tentu perlu diberi materi tentang pemahaman banyak budaya atau pendidikan multicultural.

Dapat dikemukakan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan saat ini sangat berat dan kompleks. Oleh sebab itu, upaya antisipasi perlu dipikirkan secara serius. Jika tidak ditanggapi dengan serius dan disertai solusi konkret, utamanya pada pendidikan yang bertanggung jawab penuh dengan kualitas SDM di negeri ini, maka anak-anak generasi bangsa bisa kehilangan arah, tercerabut dari akar budayanya sendiri.

3) Landasan pengembangan kurikulum nasional

Melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses pembelajaran, atau guna memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran atau tingkatan tertentu, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting.

Menurut Maksum (2004); pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah: 1) mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang dan unit pendidikan; 2) teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*), harus berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi, pengertian yang mencakup pula nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan (*skills*) yang harus dimiliki generasi muda; 3) teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh hanya mendasarkan pada teori psikologi belajar yang menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, yang hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia yang harus diseragamkan; 4) proses belajar yang dikembangkan untuk peserta didik harus pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat

isomorphisme yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses pembelajaran yang mengandalkan peserta didik belajar secara individualistis dan bersaing secara kompetitif individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar kelompok dan bersaing secara kelompok dalam satu situasi positif; dan 5) evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan harus beragam sesuai dengan sifat, tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan *alternative assessment* (portofolio, catatan observasi, wawancara) dapat pula digunakan.

Berdasarkan langkah yang dapat dikakukan dalam landasan kurikulum secara nasional, maka dapat dikemukakan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk, baik dalam segi agama, suku bangsa, golongan, ras, agama, kewilayahan, maupun budaya lokal perlu disusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional.

Supriyoko (2011) mengemukakan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi. Keragaman itu berpengaruh langsung pada kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, dan kemampuan peserta didik dalam berproses, belajar dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keberagaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum, baik sebagai proses maupun sebagai hasil. Oleh karenanya, keberagaman itu harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi, dan pelaksanaan kurikulum. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural sebaiknya didasarkan pada 4 (empat) prinsip: 1) keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat; 2) keberagaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum, seperti: tujuan, konten, proses, dan evaluasi; 3) budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar peserta didik; dan 4) kurikulum berperan sebagai media dalam pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.

Posisi keberagaman sebagai variabel bebas memang berada pada tataran sekolah dan masyarakat, yaitu suatu kurikulum dikembangkan dan diharapkan menjadi pengubah yang tangguh sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat diperkirakan (*perceived needs of a society*). Secara nyata, pengaruh tersebut berada pada diri guru yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum, bukan pada peserta didik yang menjalani kurikulum. Hal penting lain adalah, pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum.

Sudah sejak lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum (Taba, 1962). Disamping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hadjar Dewantara (1936) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain, Print (1993) (dalam Supardan, 2005) menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum bahwa: *curriculum is a construct of that culture*. Kebudayaan merupakan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya sehingga ia tidak saja menjadi landasan pada kurikulum dikembangkan, tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum.

Kedudukan kebudayaan dalam suatu proses kurikulum amat penting, tetapi dalam proses pengembangan seringkali para pengembang kurikulum kurang memperhatikannya. Dalam realitas, proses pengembangan kurikulum sering diwarnai oleh pengaruh pandangan para pengembang kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan mengenai kebutuhan anak didik dan masyarakat sering ditanggapi dengan jawaban mengenai adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kedudukan yang penting dari kebudayaan terabaikan seperti halnya landasan lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum.

Perlu disadari pula bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya, seperti dinyatakan dalam slogan nasional '*Bhinneka Tunggal Ika*'. Kenyataan ini diakui seorang ahli sejarah India berbangsa Amerika; Wolpert (1965) mengatakan bahwa masyarakat India adalah *more pluralistic in every respect than any other on earth expect, perhaps, Indonesia*. Oleh karena itu, bila

kebudayaan merupakan salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang sudah tidak dapat diabaikan lagi.

PENUTUP

Pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Hal ini berarti bahwa keberagaman kebudayaan menjadi materi yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum. Pengertian pendekatan multikultural dalam kurikulum harus dapat mengakomodasi perbedaan kultural peserta didik, memanfaatkan kebudayaan sebagai sumber konten dan sebagai titik berangkat untuk pengembangan kebudayaan itu sendiri, pemahaman terhadap kebudayaan orang lain, toleransi, membangkitkan semangat kebangsaan peserta didik yang berdasarkan bhineka tunggal ika, pengembangan perilaku yang etis, dan juga tidak kalah pentingnya dapat memanfaatkan kebudayaan pribadi peserta didik sebagai bagian dari *entry-behaviour* sehingga dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk berprestasi. Atas dasar posisi pendidikan multikultural sebagai pendekatan dalam pengembangan kurikulum, pendekatan multikultural untuk kurikulum nasional diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keberagaman kebudayaan peserta didik dalam pengembangan filosofi, misi, tujuan, komponen kurikulum, dan lingkungan belajar, sehingga peserta didik dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan.

Perubahan yang diharapkan dalam konteks pendidikan multikultural tidak terletak pada justifikasi angka atau statistik dan berorientasi kognitif *ansich* sebagaimana lazimnya penilaian keberhasilan pelaksanaan pendidikan di negeri ini. Lebih dari itu, agar tercipta kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA, maka dalam konteks dunia pendidikan Indonesia sudah saatnya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan multikultural, setidaknya "dititipkan" pada mata pelajaran yang relevan, seperti: PKn, sejarah, dan agama. Hal ini perlu segera diambil sebagai sebuah tindakan, karena setidaknya dapat memberikan solusi bagi sejumlah permasalahan sosial yang dihadapi negara-bangsa Indonesia ke depan.

RUJUKAN

- Banks. James, 1993. *Multicultural Eeducation: Historical, Development, Dimension, and Practice*. Review of Research in Education, 2 (7).
- Bungin. Burhan, 2008. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gazalba. Sidi, 1981. *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Hugiono dan Poerwanta, PK, 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Rineka Cipta.
- MaHFud. Choirul, 2011. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maksum. Ali, 2004. *Paradigma Pendidikan Universal*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Miles B. Matthew & Huberman, A. Michael, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Rohidi. Tjetjep Rohendi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong J. Lexy, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Naim. Ngainun dan Sauqi. Achmad, 2011. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Parekh. Bhikhu, 2012. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.



-
- Slamet. 2016. Penerapan Nilai-nilai Multikultural dalam Institusi Pendidikan. *Majalah Pawaiyan*, Vol: XXIII, No. I, Mei 2016.
- Slamet. dkk, 2017. The Implementation of Multicultural Values in The Education Institution. *Journal of Education Development*, Vol: 5, No. I, 2017.
- Slamet, 2017, *Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Nilai-nilai Multikultural bagi Guru Sejarah SMA*, Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Sunarto. Kamanto dkk, 2004. *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping Into the Unfamiliar*. Jakarta: FISIP-Universitas Indonesia.
- Supardan. Dadang, 2005. *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, dan Global dalam Integrasi Bangsa*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Supriyoko. 2011. *Membangun Indonesia: Menuju Masyarakat Multikultural dalam Persepektif Pendidikan*. Makalah. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.